| HAL | NOMOR IKP | KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK |
|---|---|---|
| Persyaratan Kualifikasi | 30.12 | Persyaratan kualifikasi:<br>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;<br>2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;<br>a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Skala Usaha Besar, Nomor KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan dan Nomor KBLI 43909 Konstruksi Khusus Lainnya YTDL yang telah berlaku efektif;<br>b. Sertifikat Standar Nomor KBLI 41016 (BG006) Konstruksi Gedung Pendidikan dan Nomor KBLI 43909 (KK012) Konstruksi Khusus Lainnya YTDL yang telah terverifikasi atau telah disetujui otomatis pada OSS atau sedang menunggu verifikasi dengan menyampaikan tangkapan layar OSS sedang menunggu verifikasi dan sertifikat standar yang belum terverifikasi;<br>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Konstruksi Gedung Pendidikan, kode subklasifikasi BG006 dan subklasifikasi Pekerjaan Struktur Beton, kode subklasifikasi KK012 yang masih berlaku;<br>4. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;<br>5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);<br>6. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi: 1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini; 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan tidak Menuntut Ganti Rugi apabila Surat Persetujuan tentang tahun jamak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak terbit.;<br><br>8. Dalam hal Peserta akan melakukan kerja sama operasi harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi;<br><br>9. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar atau Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;<br><br>10. *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi;<br><br>11. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;<br><br>12. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:<br><br>SKP = KP – P |

| | | |
|---|---|---|
| | | KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.<br><br>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.<br><br>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;<br><br>13. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) minimal sama dengan nilai total HPS:<br><br>untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan berdasarkan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi / layanan SBU BG006 atau KK012 ruang lingkup pekerjaan Gedung laboratorium Pendidikan diperguruan tinggi.<br><br>14. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;<br><br>15. Memiliki Sertifikat Kepemilikan BIM ISO 19650 1 : 2018 dan ISO 19650-2 : 2018 Manajemen BIM, Memiliki Lisensi dan Legalitas Software BIM (Building Information Modeling, Serta memiliki pengalaman Implementasi Building Information Modeling (BIM) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemberi Kerja;<br><br>16. Memiliki Sertifikat Anti Bribery Management System ISO 37001:2016 yang masih berlaku;<br><br>17. Memiliki Sertifikat ISO 21500 : 2021 Manajemen Proyek yang masih berlaku;<br><br>18. Memiliki Penilaian Kinerja Penyedia Minimal Baik pada pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan menyampaikan tangkapan layar pada Aplikasi SIKaP, dalam hal Hasil penilaian kinerja Penyedia BarangJasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP atau Hasil Penilaian Kinerja Manual, dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; |

| | | |
|---|---|---|
| | | 19. Memiliki surat dukungan perusahaan quarry/galian C (pasir dan batu) dalam Kota Palu, yang memiliki ijin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh pihak berwewenang dan masih berlaku, serta melampirkan dokumen UKL – UPL;<br><br>20. Dalam hal peserta melakukan KSO:<br>a. evaluasi persyaratan pada angka 2a, 4, 5, 11, 12, dan 18 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;<br>b. evaluasi pada angka 3 dan 2b, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU dan Sertifikat Standar yang disyaratkan;<br>c. evaluasi pada angka 14, 15, 16, dan 17, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;<br>d. evaluasi pada angka 10 dan 13 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan<br>e. evaluasi pada angka 19 dilakukan atas nama KSO. |